



Terdampak Efisiensi, Padat Karya Ditunda

WATES—Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kulonprogo menunda program padat karya, meski saat ini program sudah berjalan. Penundaan terjadi sebagai imbas adanya Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD.

Selain program padat karya, tiga program pelatihan kerja juga ditunda sampai ada kejelasan dan petunjuk teknis (juknis) dari Pusat.

Kepala Disnakertrans Kulonprogo, Bambang Sutrisno, menjelaskan proses yang sudah berjalan untuk padat karya telah mencapai penandatanganan nota perjanjian hibah daerah. Untuk proses selanjutnya kini ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.

Bambang menyebut padat karya yang ditunda rencananya digelar di 29 titik dengan total nilai anggaran mencapai Rp2,9 miliar yang bersumber dari APBD 2025. Nantinya, program ini akan mengerjakan pembangunan jalan desa, drainase, hingga pembangunan talut.

Sesuai perencanaan, program ini seharusnya dilaksanakan pada triwulan pertama 2025. Kini, Bambang mengaku, belum bisa memastikan kapan program bisa dilanjutkan. "Ada dua tahap jadwal program ini, sebelumnya diatur untuk tahap pertama ada 20 titik yang dikerjakan pada triwulan pertama 2025, kemudian tahap kedua ada sembilan titik yang dikerjakan triwulan kedua 2025, tetapi saat ini semua program ditunda pelaksanaannya," katanya.

Untuk program pelatihan kerja yang terdampak yaitu pemasaran digital, administrasi perkantoran, dan barista. Bambang menyebut tiga pelatihan kerja yang ditunda karena kebijakan efisiensi anggaran itu untuk dua tahap pada tiap paket.

Meski begitu, terdapat pelatihan kerja yang dapat dilanjutkan dan tidak berimbas kebijakan, yaitu yang bersumber dari dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT). "Pelatihan yang tidak terdampak bersumber DBHCT yaitu pelatihan *make up* dan pembuatan kue," katanya.

Kedua pelatihan kerja itu tak terdampak karena tidak termasuk yang diatur dalam kebijakan efisiensi. "Semoga program yang tertunda tetap bisa dilaksanakan di 2025 ini. Untuk pelaksanaannya kami

masih menunggu juknis," katanya. (Triyo

Handoko)